

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perpektif hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta

Hanitijo, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.

Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)* Cetakan Ke-12, Djambatan, Jakarta

Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniati, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyoto, 2011, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Mustofa, 2017, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta

R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Salim H.S., H, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku Pertama)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.

Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-27*, PT. Intermedia, Jakarta

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Sulihandari Hartanti dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*,
Cetakan Kesatu, Dunia.

Sutopo Ariesto Hadi, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media
Group, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2006, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam
Hukum Perdata*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembar tahun 2014 Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 3, tambahan Lembar tahun 2014 Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Bangunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 Tentang Perubahan Atas PMK 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

C. Tesis

A. S., Sapta Febrian, 2018, “Implementasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dikaitkan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Eliazar, Estharia, 2006, “Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli (Akta Nomor 151)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sugiharti, Imelda, 2015, “Peran Notaris Dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

W, Gede Kurnia Utara, 2018, “Akibat Hukum Pembayaran Pajak Penghasilan Sebelum Pendandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dihadapan Notaris”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

E. Website

Restitusi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

Dorong peran PPAT Pastikan PPh Final Disetor, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS DENGAN PEMBAYARAN TRANSAKSI SECARA BERTAHAP**
SARAH NOVIYALINE, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., P.hD.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Restitusi, www.ortax.org, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019